

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Nandang Firmansyah¹, Regi Refian Garis², Asep Nurdin Rosihan Anwar³
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia ^{1,2,3}
E-mail : kolen020@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan yaitu belum optimalnya Implementasi Kebijakan Tata Kelola keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis . Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator: terdapat beberapa permasalahan yaitu : Terdapatnya berita hoaks yang masih marak dan di terima oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang menerima berita hoaks melalui media sosial. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Jaringan Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Jaringan Kabupaten Ciamis Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu bersumber dari data primer yang berasal dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Masyarakat, sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi pustaka baik berupa dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, studi lapangan laporan hasil penelitian, buku-buku, internet, karangan ilmiah, dan bacaan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara keseluruhan menganalisis Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi dan Jaringan Kabupaten Ciamis masih belum optimal.

Kata Kunci : *Implementasi, Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan, Dinas Komunikasi dan Informatika..*

PENDAHULUAN

Keamanan informasi di era global saat ini menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan bersama. Jaringan komputer hingga internet yang bersifat global dapat dengan mudah diserang dan tidak aman. Hal ini menjadi

perhatian, khususnya bagi para pengembang sistem informasi yang harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pengguna teknologi. Keamanan siber saat ini menjadi isu prioritas seluruh negara di

dunia sejak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudahan yang ditawarkan berbanding lurus dengan tingginya tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi. Dalam menciptakan ketertiban umum perlu adanya kebijakan untuk selalu menjaga tata kelola keamanan dan jaringan. Disebutkan pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Teknologi Informansi Dan Komuikasi Di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa Tata Kelola Keamanan dan Jaringan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ciamis masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Terdapatnya berita hoaks yang masih marak dan di terima oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang menerima berita hoaks melalui media sosial.
2. Belum meratanya sosialisasi terkait tata kelola keamanan informasi dan jaringan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ke tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Hal ini dibuktikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Ciamis terakhir kali melakukan sosialisasi pada tahun 2019.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memastikan kebenaran informasi yang mereka terima. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak sumber informasi yang tidak bertanggung jawab

sehingga masyarakat susah dalam memilah kebenaran informasi.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu bentuk hubungan pemerintah dengan lingkungan atau masyarakatnya. Kebijakan dibuat untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan masyarakat serta untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Dalam hal ini, kebijakan merupakan produk utama pemerintah yang berupa output untuk kepentingan hidup masyarakat. Menurut Friedrich dalam Agustino (2017:16) mendefinisikan kebijakan sebagai :

“... tindakan yang diusulkan dari seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang yang diusulkan oleh kebijakan untuk digunakan dan diatasi dalam upaya mencapai tujuan atau mewujudkan tujuan atau maksud”.

Dari pendapat diatas, kebijakan bisa diartikan sebagai pedoman yang dibuat pemerintah bagi semua warga negara dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Seperti halnya menurut Chandler dan Plano dalam Syahrudin (2018:3) kebijakan publik merupakan strategi pemanfaatan sumber daya untuk memecahkan masalah.

Semua pembuatan kebijakan publik akan selalu melibatkan pemerintah dan dengan melalui proses tertentu. Dalam prosesnya,

sebuah kebijakan ketika diberlakukan pasti memerlukan penyesuaian agar bisa diterima dengan baik oleh sasaran kebijakan.

Pakar Perancis, Lemieux dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai produk-produk aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik yang terjadi di suatu lingkungan tertentu yang dilaksanakan oleh aktor politik yang berlangsung sepanjang waktu.

Oleh karena itu, kebijakan tidaklah bersifat spesifik tetapi bersifat luas dan memiliki peran strategis yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya.

Tinjauan Tahapan Kebijakan

Kebijakan publik merupakan sebuah proses politik dan administrasi yang biasanya memiliki tiga dimensi pokok yaitu perumusan, implementasi, dan pengendalian. Sementara itu, Dye dalam (Nugroho, 2021:7) mengembangkan proses kebijakan ke dalam enam tahap, yaitu *Problem Identification, Agenda Setting, Policy Formulation, Policy Legitimation, Policy Implementation, dan Policy Evaluation*.

Proses pembuatan kebijakan publik melewati tahapan-tahapan yang kompleks karena melibatkan banyak variabel yang harus dikaji sehingga beberapa ahli politik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengkajian kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003:24) adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda
Anggota yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah dalam agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompentensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Sangat mungkin terjadi pada tahap ini suatu masalah tidak tersentuh sama sekali karena masalah lain yang menjadi fokus pembahasan.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dikaji pemecahan masalah yang sesuai. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Masing-masing alternatif bersaing agar dapat dipilih sebagai kebijakan yang dapat memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor kebijakan akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.
3. Tahap adopsi kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur

lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi. Kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan meraih dampak yang diharapkan yaitu memecahkan masalah di masyarakat. Maka dari itu dibuatlah ukuran dan kriteria yang menjadi pengukur mencapai tujuan yang diharapkan atau tidaknya kebijakan publik tersebut.

Dengan demikian tahap-tahap tersebut menggambarkan aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus dimana setiap tahapan saling berhubungan satu sama lain dengan tahapan lainnya.

Tinjauan Elemen Elemen Kebijakan Publik

Tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, dan bukan tidak mungkin pula suatu kebijakan dapat mengatasi permasalahan yang ada terutama dimasyarakat.

Adapun elemen-elemen kebijakan menurut Anderson dalam Widodo (2010:14) adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau selalu berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah untuk masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa terdapat elemen-elemen dalam kebijakan yaitu adanya tujuan, adanya tindakan untuk mengatasi permasalahan, dan pelaksanaan kebijakan berdasar pada peraturan yang berlaku yang bersifat memaksa serta adanya strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Selanjutnya sebagaimana menurut Putra (2003:81) elemen-

elemen kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana.
2. Penjabaran tujuan kedalam berbagai aturan pelaksana (Standard Operating Procedures)
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas didalam dan diluar badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian suatu kebijakan dapat dilaksanakan oleh organisasi dengan baik apabila elemen-elemen tersebut dilaksanakan sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai. Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai sosial dimasyarakat. Apabila pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan nilai sosial masyarakat maka akan mendapatkan kendala ketika kebijakan tersebut diimplementasikan

Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif apabila sumber-sumber pendukungnya tidak ada. Bentuk sumber pendukung tersebut berupa sumber daya baik itu sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya.

Dalam model kebijakan *top-down* yang dikembangkan oleh Edward (Nurdin, 2017:29) yang mengemukakan bahwa ada empat variabel yang menentukan

keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi, berarti keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan agar implementor mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan dimana dilaksanakan kepada kelompok sasaran.
2. Sumber daya, terdiri sumber daya manusia berupa kompetensi atau financial. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, apabila implementor kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif.
3. Disposisi, merupakan sifat dan karakteristik yang dimiliki implementor. Sikap pelaksana seringkali menyebabkan masalah apabila terdapat perbedaan cara pandang antara implementor dengan pembuat kebijakan. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan penempatan pegawai dan insentif.
4. Struktur birokrasi, yaitu susunan unit kerja dalam organisasi yang menunjukkan pembagian kerja dengan adanya kejelasan fungsi atau kegiatan yang diintegrasikan.

Suatu kebijakan mempunyai satu tujuan yang jelas serta berorientasi nilai kebijakan. Kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya

semaksimal mungkin harus sesuai dengan apa yang diharapkan pembuat kebijakan.

Welmer dan Vining sebagaimana dikutip dalam Nurdin (2013:34-35) terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program yaitu:

1. Logika kebijakan. Hal ini bermaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mempunyai dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kejadian akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan disini mencakup lingkungan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan fisik/geografis.
3. Kemampuan implementor kebijakan. Implementor kebijakan harus memiliki tingkat kompetensi yang menunjang untuk keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut, kompetensi sumber daya dapat menjadi sebuah faktor penentu keberhasilan implementasi ataupun bisa juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan. Sumber daya disini juga termasuk waktu, tenaga manusia, dan biaya/dana.

Sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah umumnya bersifat sebagai pedoman dan arahan untuk melakukan sesuatu. Seperti menurut Dye (Agustino, 2017:152-153) menyebutkan model implementasi kebijakan:

Model Implementasi Interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika sebuah program dianggap kurang memenuhi harapan stakeholder.

Dengan demikian, pendekatan dan model implementasi kebijakan merupakan sebuah alat dan strategi untuk memudahkan dalam pengukuran kualitas kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu, kelompok atau masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sutopo dan Arief menyimpulkan beberapa pendapat pakar tentang pengertian penelitian kualitatif adalah :

- “(1) Mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok,
- (2) Kegiatan terencana untuk menangkap praktek penafsiran responden atau informan terhadap dunianya (*emik atau*

versthen) yang selalu majemuk berada dan dinamis,

- (3) Bersifat menggambarkan mengungkapkan dan menjelaskan (*to describe explore and explain*)” (Sutopo dan Arief, 2012:43).

Adapun menurut Sukmadinat dasar penelitian kualitatif adalah ” konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan dinamis dalam suatu pengalaman atau konteks social” (Sukmadinata, 2005:13). Sedangkan menurut Penelitian deskriptif menurut Ulber menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang situasi khusus, *social setting* atau hubungan” (Silalahi, 2010:27).

Digunakannya metode penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis ini penting dilakukan di Kabupaten Ciamis.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Sementara itu data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari dokumentasi, data statistik dari kantor Desa dokumentasi, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun yang termasuk data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil wawancara.
2. Observasi, dan
3. Dokumen-dokumen lain yang mendukung terhadap penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai judul Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis akan dijelaskan dengan menggunakan Implementasi menurut Edward dalam (Nurdin 2017:29) yaitu :

Komunikasi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Menjelaskan bahwa kurangnya perangkat yang memadai serta kurangnya partisipasi dari Pemerintah Desa dalam pelaksanaan sosialisasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam hal tata kelola keamanan informasi dan jaringan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi komunikasi yang terdiri dari dua indikator diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis belum optimalnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam hal

komunikasi dan belum merata nya sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaringan.

Uraian diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward (Nurdin, 2017:29) yang mengemukakan bahwa Komunikasi, berarti keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan agar implementor mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan dimana sasaran kebijakan harus dilaksanakan kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan teori diatas bahwa komunikasi merupakan peran pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan sinergi dimana suatu bentuk implementasi kebijakan harus diikuti dengan komunikasi yang baik untuk terciptanya tujuan bersama.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam dimensi komunikasi belum optimal, karena masih banyaknya kekurangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal melakukan komunikasi dengan masyarakat.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Menjelaskan bahwa untuk menjalankan suatu kebijakan perlu adanya sumber daya yang memiliki kemampuan dan integritas terhadap suatu kebijakan tersebut..

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Adanya sumber daya yang mempuni menjadikan implementasi kebijakan akan berjalan serta masyarakat yang

mau berinisiatif menjadikan kebijakan tersebut mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi sumber daya yang terdiri dari dua indikator diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sudah optimalnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam hal sumber daya karena sudah memiliki sumber day yang mumpuni dalam bidangnya.

Uraian diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward (Nurdin, 2017:29) yang mengemukakan bahwa Sumber daya, terdiri sumber daya manusia berupa kompetensi atau financial. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, apabila implementor kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif.

Berdasarkan teori diatas bahwa sumber daya merupakan peran pemerintah untuk mencapainya suatu bentuk implementasi kebijakan harus diikuti dengan sumber daya yang memiliki intelektual dan integritasi yang tinggi untuk terciptanya tujuan bersama.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam dimensi sumber daya sudah optimal, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis memiliki implementator yang intelektual dan berintegritas.

Disposisi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Ciamis Menjelaskan bahwa untuk menjalankan suatu kebijakan perlu adanya untuk menunjang keberlangsungan kebijakan tersebut..

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Adanya insentif yang tersedia dan cukup untuk pelaksana kebijakan berpengaruh pada kesungguhan kinerja pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam kinerja petugas atau pegawai dalam menjalankan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan..

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi disposisi yang terdiri dari dua indikator diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis belum optimal karena masih minimnya sarana prasarana untuk menjalankan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan serta masih minimnya insentif bagi petugas sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan.

Uraian diatas belum sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward (Nurdin, 2017:29) yang mengemukakan bahwa sifat dan karakteristik yang dimiliki implementor. Sikap pelaksana seringkali menyebabkan masalah apabila terdapat perbedaan cara pandang antara implementor dengan pembuat kebijakan. Hal tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan penempatan pegawai dan insentif.

Berdasarkan teori diatas bahwa disposisi merupakan peran pemerintah untuk mencapainya suatu

bentuk implementasi kebijakan harus diikuti dengan memperhatikan penempatan pegawai dalam menjalankan suatu kebijakan serta memberikan insentif sebagai penunjang dalam melaksanakan kebijakan tersebut .

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam dimensi Disposisi belum optimal, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis masih memiliki kekurangan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan serta pemberian insentif yang masih minim menyebabkan implemtansi kebijakan kurang maksimal

Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Menjelaskan bahwa dalam pembagian tugas serta tupoksinya dalam menjalankan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan sudah sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Adanya pembagian tugas yang baik untuk pelaksana kebijakan merupakan hal penting dalam implementasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam pembagian tugas telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dimensi struktur birokrasi yang terdiri dari dua

indikator diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sudah optimal karena dalam pebagian tugas serta tupoksi untuk mengimplementasiakan kebijakan sudah sesuai dengan prosedur

Uraian diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edward (Nurdin, 2017:29) yang mengemukakan bahwa kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang jika struktur birokrasi tidak kondusif maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif yang akan menghambat jalannya kebijakan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membuat SOP (*Standard Operating Procedures*) dan melaksanakan fragmentasi

Berdasarkan teori diatas bahwa struktur birokrasi merupakan peran pemerintah untuk mencapainya suatu bentuk implementasi kebijakan harus diikuti dengan pembagian petugas yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan di implementasikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam dimensi Struktur Birokrasi sudah optimal, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menentukan petugas untuk mengimplementasikan kebijakan tata kelola keamanan jaringan dan informasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara sebagian besar informan menyatakan pelaksanaan indikator dilaksanakan kurang optimal dari 8 indikator yang dijadikan ukuran dalam penelitian ini 4 indikator pelaksanaannya kurang optimal dan 4 indikator dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa judul Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis pada umumnya kurang optimal dilaksanakan, hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan keinginan masyarakat terkait belum meratanya sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaringan.

Dimensi Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Belum Optimal dalam komunikasi dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Adanya bentuk komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat belum merata sosialisasi tentang tata kelola keamanan informasi dan jaringan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ciamis.

2. Adanya konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus diterapkan dan dijalankan pada pendirian awal dan jelas adanya pandemi covid – 19 menjadi hambatan untuk pelaksanaan sosialisasi tentang tata kelola keamanan informasi dan jaringan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Dimensi Sumber daya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sudah optimal, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis memiliki implementator yang intelektual dan berintegritas.

Dimensi Disposisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis belum optimal, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Adanya persepsi pelaksana kebijakan, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan terkait kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan dan juga masih adanya Masyarakat yang kurang mengetahui adanya kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan tersebut
2. Adanya insentif yang tersedia dan cukup untuk pelaksana kebijakan berpengaruh pada kesungguhan kinerja pelaksana kebijakan. minimnya insentif untuk pelaksanaan kebijakan tata kelola

keamanan informasi dan jaringan menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan secara maksimal..

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Sudah Optimal, dilihat dalam menentukan petugas untuk mengimplementasikan kebijakan tata kelola keamanan jaringan dan informasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada

Beberapa hal yang menjadi saran dan rekomendasi sebagai bahan rujukan untuk perbaikan guna meningkatkan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis berperan lebih optimal :

Hendaknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis melakukan evaluasi terhadap beberapa persoalan yang menjadi hambatan seperti :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sebaiknya terus meningkatkan dan mempertahankan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta bisa mengusahakan terkait adanya sosialisasi yang merata.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sebaiknya melakukan pengajuan terkait sarana prasarana kepada Pemerintah Daerah untuk menunjang implementasi kebijakan agar sesuai dengan napa yang direncanakan.

Sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dapat memberikan insentif atau tunjangan

bagi petugas pelaksana kebijakan sesuai apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan implementasi tata kelola keamanan informasi dan jaringan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solihin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. [e-book],
- Agus Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Alexander Phuk Tlijen. 2019. *Kebijakan Publik*. [e-book],
- Al-Shareef, S.Y & Al-Qarni, R.A. (2016). The effectiveness of using teacher-teacher wikis in collaborative lesson planning and its impact on teacher's classroom performance. *English Language Teaching*. 9(4):halaman 186-202.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipt
- Leo Agustino 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Riduwan. (2014). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk Mahasiswa S-1, S-2, dan S-3)*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. [e-book], diakses tanggal 29 November 2022.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra..
- Whitman, M.E., & Mattord, H.J, *Management of Information Security, Third Edition*, Boston: Course Technology, 2010.

Undang –Undang

- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Teknologi Informansi Dan Komunikasi Di Kabupaten Ciamis